

Masalah-Masalah Demokrasi: Diskursus Hak Mayoritas dan Minoritas

Franky P Roring

Dekan FISIP Universitas Bung Karno

Abstract

This article discusses the limitations of democracy. Democracy substantively recognizes the existence of minority rights and the rights of the majority. The establishment of majority rights can give rise to the tyranny of the majority which is harmful to the interests of the minority. However, minorities can also be in power and control the politics of a country, so the majority vote is also ignored. Majority and minority discourse becomes important in the relationship between politics and power.

Keywords: Majority, Minority, Democracy.

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai masalah keterbatasan demokrasi. Demokrasi secara substansif mengakui eksistensi hak minoritas dan hak mayoritas. Pengutamaan hak mayoritas dapat memunculkan tirani mayoritas yang berbahaya bagi kepentingan minoritas. Walaupun demikian, minoritas juga dapat kelompok yang berkuasa dan mengontrol politik suatu negara, sehingga suara mayoritas juga terabaikan. Diskursus mayoritas dan minoritas menjadi hal penting dalam relasi antara politik dan kekuasaan

Kata Kunci : Mayoritas, Minoritas, Demokrasi.

Pendahuluan

Persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam politik menjadi perdebatan tersendiri dalam diskursus demokrasi. Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang terbentuk sebagai perwujudan kebebasan individu, namun sistem demokrasi memiliki keterbatasan untuk menampung semua individu dalam sistem pemerintahan. Sistem demokrasi memang membatasi individu untuk memasuki sistem yang ada, dan kondisi demikian memunculkan persoalan ketidakadilan bagi individu sebab keputusan demokrasi terbentuk atas dasar suara minoritas. Pengakuan suara minoritas memang memberikan keadilan politik yang sejalan dengan prinsip masyarakat pluralis. Kondisi pluralis dalam konteks demokrasi sebenarnya bermanfaat untuk mencegah potensi kemunculan tirani mayoritas yang bisa membuat keputusan politik yang mencabut hak-hak politik minoritas.

Pengakuan hak minoritas juga menjadi problematika tersendiri sebab itu juga memunculkan potensi keputusan politik yang tidak mencerminkan keputusan semua rakyat, melainkan itu hanya keputusan elit. Elit menurut Birch (2001) memiliki kemampuan untuk mengorganisir sistem sosial, ekonomi, dan politik. Kemampuan tersebut menyebabkan elit mampu mendominasi pemerintahan dan keseluruhan rakyat banyak. Para elit juga memiliki akses terhadap negara, dan negara cenderung mengutamakan elit sebab sebagian elit mengontrol sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi dari elit menjadi kebutuhan bagi negara sebab negara memiliki keterbatasan untuk menyediakan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan rakyat, dengan demikian negara menurut Milliband, Althuisser, dan sebagainya terkesan menjadi instrumen kekuasaan dari elit.

Penguasaan kekuasaan negara oleh elit menjadi alasan Lively (1975) tidak menyetujui pemerintahan oleh minoritas. Pemerintahan oleh minoritas menjadi sebuah pemerintahan yang tidak mencerminkan kebaikan bersama atau mayoritas. Pemerintahan mayoritas berarti meletakkan semua masyarakat sebagai aktor dalam politik yang terlibat dalam setiap keputusan politik. Keputusan politik tersebut harus mendapatkan persetujuan mayoritas melalui mekanisme *simple majoritarian decision* yang bermakna tiga hal. Pertama, keputusan politik harus memenuhi syarat mayoritas sekalipun peserta demokrasi tidak mayoritas. Kedua, mayoritas harus mengawasi dan melibatkan diri dalam setiap jenjang kebijakan publik dari pemerintahan elit. Ketiga, mayoritas harus memiliki kesempatan untuk memilih berbagai keputusan alternatif dengan strategi apapun, mulai dari penggerakan asosiasi masyarakat sipil hingga pemanfaatan pemilihan umum untuk menentukan kandidat pemimpin negara dan wakil rakyat.

Perdebatan mayoritas-minoritas memang pada akhirnya berkaitan dengan masalah ketidaksetaraan, dan itu berpusat pada pertanyaan mengenai pihak yang mengalami ketidaksetaraan politik. Ketidaksetaraan juga berkaitan erat dengan pengutamaan hak antara mayoritas dan minoritas, serta dengan prosedur untuk menentukan pihak yang berhak untuk memperoleh kesetaraan politik, dan prosedur untuk menjalankan proses penyetaraan hak politik. Penyetaraan hak tidaklah mudah sebab pengutamaan hak mayoritas bisa merugikan hak minoritas, dan pengutamaan hak minoritas juga bisa merugikan hak mayoritas. Perdebatan tersebut menyentuh tema kapitalisme versus demokrasi, masyarakat yang tidak berdaya, dan genderisasi politik. Kesemua hal tersebut akan menjadi inti dari pembahasan artikel ini secara sistematis.

Demokrasi, Kapitalisme, dan Kebebasan.

Demokrasi, kapitalisme, dan kebebasan merupakan sesuatu yang terkait satu sama lain. Demokrasi merupakan wujud kekuasaan politik yang berakar pada prinsip kebebasan individu untuk

memerintah diri sendiri. Kemudian, kapitalisme juga berakar pada pengakuan atas kebebasan individu untuk menjalankan transaksi dan aktivitas ekonomi. Demokrasi memberikan ruang bagi individu untuk secara bebas menjalankan kapitalisme. Kapitalisme yang berjalan dengan baik juga bisa menjadi tanda hidupnya demokrasi selama setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih aktivitas ekonominya selama tidak bertentangan dengan hukum. Kapitalisme dan demokrasi juga menempatkan pentingnya pembatasan kekuasaan negara terhadap individu dan masyarakat.

Pembatasan kekuasaan negara bagi Friedman (Green 1993: 146-147) sebagai fondasi kebebasan individu memiliki dua premis. Pertama, ruang lingkup kekuasaan negara harus dibatasi oleh kekuatan kontrak individu, asosiasi independen, dan perusahaan untuk menjamin keseimbangan kekuasaan antara privat dan publik, serta untuk menjaga ketertiban hukum. Kedua, kekuasaan negara harus disebar dalam berbagai entitas kekuasaan berbeda mulai dari level nasional hingga lokal, sehingga kekuasaan negara tidak berpusat pada satu organisasi dan tidak menjadi tirani mayoritas. Kedua premis di atas akan mencegah hegemoni negara untuk membuat kebijakan secara sepihak dan untuk memberikan ruang bagi individu dan pasar mendesain barang dan jasa sesuai kebutuhan rakyat. Pasar dalam sistem demokrasi akan mendesain sistem pertukaran yang bebas.

Kegiatan pertukaran yang efektif hanya terjadi dalam wujud sistem perusahaan pribadi yang bebas. Sistem perusahaan lebih efisien daripada sistem rumah tangga sebab itu mampu mengembangkan transaksi ekonomi yang lebih besar dan menjangkau lebih banyak rumah tangga yang tersebar melewati batasan negara, serta melibatkan sistem pembagian kerja yang lebih efisien. Sistem perusahaan bebas sebenarnya menurut Friedman (Green 1993: 148-149) harus menjalankan dua prinsip. Pertama, setiap individu memiliki kebebasan yang sama untuk membuat kontrak pembentukan sistem perusahaan yang bebas. Kedua, setiap individu memiliki kebebasan yang sama untuk memasuki dan keluar dari pasar. Kedua prinsip dasar tersebut menunjukkan bahwa individu memiliki kebebasan untuk menentukan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, termasuk dari kontrol penuh dari negara. Keberadaan dua prinsip tersebut akan menciptakan masyarakat yang bebas.

Masyarakat bebas menurut Friedman merupakan masyarakat yang memberikan kesempatan bagi individu untuk memaparkan pandangan politik dan pandangan kapitalis secara bebas tanpa menjadi ancaman bagi individu yang lain. Masyarakat bebas akan terwujud selama individu mampu menentukan pilihan pekerjaan atau bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan aspirasi politik individu. Kebebasan politik juga memberikan ruang bagi masyarakat kaya untuk menentukan sasaran bisnis yang layak memperoleh pendanaan. Masyarakat yang menjadi sasaran juga memiliki kebebasan

untuk mendesain program atau rencana bisnis sekreatif mungkin tanpa adanya paksaan dari pihak lain, khususnya dari negara. Kondisi demikian hanya dapat terjadi dalam negara demokrasi, dan sistem sosialisme tidak bisa memenuhi itu semua sebab kuatnya kontrol negara terhadap keseluruhan aktivitas pasar (Green 1993: 150-151).

Keseluruhan argumentasi Friedman tidak sepenuhnya disetujui oleh Bowles dan Gintis. Kedua pemikir cenderung kapitalisme tidak selalu sejalan dengan demokrasi. Kapitalisme memang bisa berkembang dengan lebih baik karena adanya demokrasi, namun perkembangan ide kapitalisme justru menjauhi prinsip demokrasi. Prinsip dasar demokrasi sebenarnya menghendaki ranah ekonomi menjadi ranah publik dengan setiap individu memiliki kesamaan hak untuk menjalankan aktivitas ekonominya, dan kondisi tersebut justru tidak terjadi seiring kuatnya institusi ekonomi yang bekerja di luar kebebasan individu. Institusi ekonomi cenderung mengabaikan efektifitas peran politik, keterbukaan informasi pasar, dan hierarki pasar yang demokratis (Green 1993: 165-169).

Bowles dan Gintis kemudian menyoroti sisi tidak demokratis dari sistem pembagian buruh. Keduanya menyoroti empat karakteristik penyusun sistem buruh yang tidak demokratis, fragmentasi pekerjaan dalam wujud kecil, pemisahan konsepsi pekerjaan dari pelaksanaan tugas, hiarkhi pengontrolan tenaga kerja, dan penempatan individu atas dasar perbedaan SARA dan pendidikan. Kedua poin pertama menjadi masalah sebab individu buruh rentan dengan mudah mengalami pergantian secara tidak demokratis tanpa memberikan ruang mengkritisi kebijakan tersebut. Kemudian, dua poin terakhir menempatkan pekerja dalam struktur yang ketat dan tidak demokratis sebab para buruh mengalami pembedaan atas dasar SARA dan pendidikan yang justru bertentangan dengan prinsip *simple majority decision*, selain itu pekerja ditempatkan dalam relasi saling bertentangan karena adanya differensiasi tersebut (Green 1993: 170).

Pasar juga tidak sepenuhnya mendukung pembentukan budaya demokrasi. Budaya demokrasi menurut Bowles dan Gintis merupakan hasil dari proses pembentukan nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan. Budaya politik juga terlaksana melalui pemberian insentif-insentif bagi individu yang bersedia untuk mempelajari politik dan mempraktekkan demokrasi itu sendiri. Kondisi demikian tidak terjadi dalam sistem pasar terutama pasca kuatnya paradigma institusional ekonomi dari tradisi klasik baru. Institusi ekonomi menempatkan semua hal yang berada di luar sistem ekonomi sebagai beban, dan itu termasuk dimensi sosial dan politik. Dimensi luar ekonomi dapat direspon oleh sistem ekonomi selama semua sisi nonekonomi dapat diproses secara efisien, sesuai prinsip ekonomi. Ekonomisasi

nonekonomi juga bermakna adanya prosedur sistematis untuk menyelesaikan semua masalah sosial dengan meminimalisasi ongkos sosial dari perdebatan politik (Green 1993: 171).

Institusi ekonomi menurut Bowles dan Gintis bertentangan dengan prinsip demokrasi (Green 1993: 172-174) sebab institusi ekonomi mengabaikan demokrasi sebagai proses mayoritas individu memiliki hak untuk terlibat dalam formulasi kebijakan politik. Institusi ekonomi melihat pemerintahan demokratis tidak perlu melibatkan semua partisipasi politik warga sebab itu tidak efisien, sehingga sistem perwakilan sudah mencukupi prinsip demokrasi. Demokrasi sebenarnya sangat membutuhkan otonomi individu untuk menentukan pilihan kebijakan alternatif yang berbeda dan sistem perwakilan tidak selalu merefleksikan kepentingan publik, melainkan kepentingan elit yang minoritas. Kemudian, institusi ekonomi juga mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya pada masa ekonomi klasik tetap merupakan hal yang penting sebab itu bisa mencegah potensi penghilangan kebebasan individu dari praktek kapitalisme yang berlebihan.

Demokrasi jelas perlu memberikan ruang bagi individu untuk mengawasi kapitalisme, dan demokrasi bisa bekerja selama ada instrumen yang membantunya, termasuk media. Media menurut Parenti memang penting bagi penjagaan nilai-nilai demokrasi, hanya saja itu juga memunculkan problematika tersendiri. Media berperan penting bagi demokrasi sehingga banyak negara berusaha memberikan kebebasan pers yang terlepas dari kondisi represif. Pemerintahan yang represif memang bisa menjadi ancaman bagi demokrasi, namun Parenti justru berpendapat bahwa media yang lebih berbahaya bagi demokrasi. Media memiliki kekuatan untuk membuat bias atas kebijakan publik dan itu mendorong kemunculan kritik dari masyarakat. Fenomena demikian memang menunjukkan kuatnya peranan elit pemilik media dalam pembentukan opini sesuai kultur kapitalis (Green 1993: 158).

Media sebagai bagian dari kapitalisme akan membentuk opini masyarakat sesuai dengan trend atau keinginan elit politik. Media akan menentukan hal tertentu sebagai isu politik dengan logika pasar, bahwa pemberitaan tersebut akan mampu memperoleh banyak perhatian dari publik yang kemudian menjadi sesuatu yang *mainstream*, dan mengabaikan opini berbeda. Media bisa mengarahkan opini politik secara kontinue sehingga penerima berita saat terus terekspos oleh informasi akan menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Pada akhirnya, media bisa menjadi sarana propaganda politik melalui proses transaksional antara elit politik dengan elit kapitalis media. Media bahkan bisa membangun persepsi masyarakat untuk menentang kekuasaan politik tertentu yang menjadi lawan ideologis pemerintah atau kubu berkuasa, misalnya opini kontra terhadap pemerintahan Nikaragua atau China atau Mesir, dan publik menerima itu sebagai kebenaran tanpa perlu konfirmasi ulang (Green 1993: 159-161).

Media sebagai industri juga merefleksikan organisasi bisnis yang besar. Media memiliki kekuatan politik dalam negeri sehingga ia mampu membentuk opini nasional. Media menurut Clairmont (1995) dan Nonini (2005) juga terhubung dengan jaringan media yang lebih luas secara internasional. Jaringan media internasional menjadi kepanjangan tangan dari kekuatan korporasi global yang meyarakan kepentingan bisnis internasional. Jaringan media internasional juga akan mempengaruhi pemberitaan dalam suatu negara untuk meninggikan reputasi pemimpin yang dekat dengan korporasi besar atau lembaga finansial dunia. Jaringan yang sama akan mendeskreditkan pemimpin yang dipersepsikan sebagai musuh kapitalis atau anti demokrasi.

Media yang seharusnya menjadi wadah untuk memperjuangkan kebebasan individu dan nilai-nilai demokrasi, namun itu tidak terjadi. Media justru menjadi bagian dari kekuasaan elit dan media juga hanya menyuarakan suara dari elit baik elit politik maupun elit ekonomi. Media seharusnya berperan sebagai wadah kebebasan individu untuk memperoleh informasi yang jujur, namun media mengarahkan opini publik sesuai keinginan elit. Media sebagai sebuah industri juga memiliki kepentingan tersendiri, dan media dengan kekuatan informasi bisa beetransaksi politik dengan elit (Baker 1998). Kemudian, media bisa menentukan opini dan mengarahkan publik untuk menerimanya sebagai kebenaran. Kondisi demikian tentunya menempatkan media dan kapitalisme sebagai yang berkuasa dan rakyat penerima sebagai yang tidak berdaya.

Masyarakat yang tidak berdaya bermakna bahwa masyarakat tersebut tidak memperoleh kebebasannya, dan itu bermakna ada kegagalan dalam proses pembangunan. Sen (1999) berpendapat kegagalan pembangunan terjadi pada saat pembangunan hanya mampu menciptakan kebebasan pasif yang menurut Berlin sebatas terpenuhi hak-hak minimalnya, namun pembangunan gagal menciptakan kebebasan positif, yaitu kebebasan yang secara aktif mendorong rakyat untuk terlibat dalam perumusan politik, termasuk perumusan kebijakan ekonomi itu sendiri. Kebijakan ekonomi yang gagal memberi ruang kebebasan politik berdampak kepada hilangnya keamanan ekonomi. Keamanan ekonomi merupakan konsep yang menekankan pada keamanan kondisi material dan imaterial dari rakyat terhadap setiap proses pembangunan. Keamanan ekonomi memang akan sulit terjadi jika ada penguasaan kekuasaan yang berpusat pada elit, sehingga itu memunculkan ketidakberdayaan. Tema tersebut menjadi inti bagian berikut artikel ini.

Kekuasaan, Ketidakberdayaan, dan Genderisasi Politik.

Sumber kekuasaan bagi Parenti tidak didistribusikan secara random, melainkan itu disebarkan oleh sebuah sistem sosial. Sistem sosial tersebut menentukan pembagian kekuasaan kepada yang berhak

memiliki kekuasaan tersebut. Sistem sosial menempatkan sekelompok individu sebagai penentu pembagian skema sosial, mulai pendidikan, informasi, kekayaan, kepemilikan, hingga penggunaan kekerasan dan hukum untuk menjaga eksistensi kekuasaan. Sistem sosial akan menentukan pihak yang memiliki otoritas sebagai penguasa dan pihak yang lain menjadi obyek kekuasaan. Sistem sosial demikian menyebabkan kekuasaan tidak tersebar untuk semua individu. Monopoli kekuasaan menunjukkan desirada sosial seperti pembelajaran sendiri, kekuasaan yang otonom, dan sebagainya (Green 1993: 185).

Desirada sosial juga menentukan kualitas kehidupan individu atas dasar persepsi dua persepsi. Pertama, persepsi material mencerminkan penilaian individu dan kelompok sosial terkait dengan masalah kepemilikan material. Kedua, persepsi nonmaterial yang menunjukkan penilaian bahwa permasalahan sangat kuat aspek nonekonomi. Kedua persepsi sangat dipengaruhi oleh strata kelas sosial, yang dapat saja memiliki pendapat berbeda mengenai kondisi sosialnya. Masyarakat yang memiliki ekonomi kuat melihat fenomena ketertinggalan masyarakat, seperti perumahan buruk, kemiskinan, dan sebagainya hanya merupakan isu material. Persepsi berbeda akan muncul dari kalangan lemah bahwa itu adalah kenyataan imaterial yang harus diterima tanpa ada pilihan lain, dan itu membuat posisi mereka semakin terdepresiasi (Green 1993: 186).

Masyarakat lemah sebenarnya mengalami kondisi terdepresiasi sebab lemahnya kekuasaan terhadap sumber materi, namun kondisi masyarakat lemah dalam perspektif pluralis juga tidak tunggal. Sebagian masyarakat memang dalam kondisi kemiskinan yang parah, namun sebagian yang lain berada dalam posisi pertengahan, dan mereka termasuk strata sosial yang baru, yaitu kelas menengah. Kelas menengah menurut Parenti adalah fenomena sosial baru (di Amerika Serikat) yang terbentuk dari kelas-kelas pekerja "kerah biru" dan "kerah putih." Kedua kelas tersebut merefleksikan buruh dan manajer profesional yang mungkin berpenghasilan baik, namun juga sangat rentan terhadap masalah ekonomi, mulai dari ancaman PHK, gaji yang lebih rendah dari inflasi, hingga pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan tinggi. Mereka pun juga memiliki posisi yang sama lemahnya dengan masyarakat miskin sebab adanya keterbatasan sosial dan diskriminasi atas dasar SARA, pendidikan, dan jender (Green 1993: 186-187).

Uraian Parenti mengenai kelas menengah perlu menjadi sorotan tersendiri, yaitu berkaitan dengan definisi kelas menengah. Pressman (2015) berpendapat kelas menengah tidak memiliki definisi yang pasti. Sebagian menyoroti kelas menengah atas dasar batasan minimal pendapatan yang berada di atas angka kemiskinan. Indikator penghasilan menjadi pertanyaan tersendiri, yaitu pendapatan individu atau

keluarga yang menjadi ukuran. Sebagian yang lain menyoroti dari segi tingkat pendidikan tinggi. Sebagian lain membandingkan dari segi pendapatan regional. Walaupun ada perbedaan definisi, dalam konteks artikel, kelas menengah tentunya berkaitan posisi daya tawar terhadap kekuasaan yang lebih baik daripada kelas bawah, walaupun itu juga rentan dengan ancaman kemunduran finansial.

Ketimpangan sosial dalam sistem kapitalisme terbentuk dari sistem distribusi kekuasaan yang tidak setara dalam masyarakat dengan persepsi bahwa kekuasaan lebih penting daripada kebutuhan. Struktur sosial demikian menempatkan sekelompok orang kaya, mulai dari aktor hingga pebisnis memiliki akses yang kuat terhadap sistem politik, dan mereka juga menguasai berbagai jabatan politis strategis dari level lokal hingga nasional. Mereka yang kuat mampu mendominasi akses uang dan politik secara setara, namun relasi yang timpang antara yang kaya dan miskin menjadi tidak setara. Masyarakat lemah sebenarnya tetap memiliki peluang untuk memasuki sistem politik dan mengakses sumber-sumber kekuasaan yang sama, dan itu tergantung kesiapan masyarakat untuk memperjuangkan hak politiknya (Green 1993: 188-191). Tekanan sosial dan ekonomi berdampak pada tingginya perasaan warga miskin teralienasi dari kehidupan sosial yang layak (Tittle and Stanford 1992), dan demokrasi seharusnya mampu menjadi sarana pembebasan rakyat.

Demokrasi bisa menjadi solusi atas kondisi ketidakberdayaan dalam masyarakat selama sistem demokrasi bisa memberikan ruang atas perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Pengakuan atas perbedaan hanya dapat terjadi jika hal-hal yang dianggap termasuk ranah privat, ditarik dalam ranah publik untuk kemudian dielaborasi lebih lanjut. Ranah privat bisa bermakna dua, yaitu ranah kapitalisme dan ranah identitas individual. Ranah kapitalisme berarti berkaitan dengan semua kegiatan perekonomian oleh sistem pasar yang merefleksikan perusahaan pribadi. Ranah identitas individu yang berkaitan dengan semua identitas personal yang perlu dibahas dalam konteks politik. Satu tema identitas individu yang perlu dikaji dalam artikel ini adalah representasi perempuan dalam politik sebab perempuan pun sebenarnya termasuk aktor politik yang sering mengalami peminggiran.

Sistem representasi menjadi titik kritik dari Anne Philips sebab itu cenderung selalu melihat individu hanya bagian dari grup politik, bukan sebagai individu itu sendiri. Problematika tersebut muncul disebabkan oleh persepsi yang memisahkan antara ranah privat dengan publik. Ranah privat berkaitan dengan semua hal yang bersifat domestik dan pribadi, dan ranah publik berkaitan dengan ranah yang terbuka bagi setiap individu untuk membicarakan tema-tema besar yang menjadi isu publik. Penekanan atas nama grup dan pembagian ranah menurut Phillips telah menjadi sistem yang mensubordinasi perempuan hanya sebagai aktor domestik, dan grup selalu mewakili mayoritas lelaki. Representasi grup

bukan tidak penting sebab persoalan ketidaksetaraan memang berkaitan relasi grup, namun itu juga berdampak kepada setiap individu anggota grup, termasuk perempuan yang sering diabaikan dalam proses pembuatan keputusan politik (Green 1993: 192-193).

Feminisme berupaya mengkritisi keputusan politik yang menempatkan isu perempuan sebatas ranah privat namun peran perempuan justru sering diatur dalam ranah publik. Inkonsistensi hal tersebut memunculkan problematika politik tersendiri. Pengaturan masalah perempuan oleh ranah publik seharusnya juga melibatkan perempuan sebab hanya perempuan yang memahami kebutuhan perempuan, mulai dari kebutuhan kesehatan reproduksi hingga pendidikan yang terbuka bagi perempuan. Permasalahan terjadi pada saat ada paradigma bahwa perbedaan jenis kelamin tidak boleh mengintervensi keputusan politik, namun itu semua mengabaikan dua hal. Pertama, mayoritas pembuat keputusan politik berasal dari lelaki. Kedua, Keputusan mayoritas yang terlihat universal merupakan hasil konstruksi berpikir dari lelaki, sehingga keputusan mengenai perempuan dibuat dengan perspektif pria (Green 1993: 194-195).

Anne Philips menyadari bahwa ide dia mungkin bisa memunculkan perdebatan tersendiri, itu sebabnya dia berpendapat bahwa tidak ada perbedaan substansif mengenai demokrasi. Feminisme hanya berusaha meningkatkan partisipasi aktif perempuan sebagai subyek politik yang berperan dalam perumusan kebijakan politik. Perspektif feminisme akan mewarnai setiap proses politik dalam segala tingkatan, mulai dari level lokal, nasional, regional, hingga internasional. Feminisasi demokrasi tetap membahas permasalahan politik besar, seperti partai politik, parlemen, relasi pemerintahan pusat dan daerah, anggaran negara, hingga masalah ketenagakerjaan, namun itu semua dengan menambahkan perspektif perempuan atas semua isu tersebut. Perspektif tersebut akan menyeimbangkan antara keterwakilan dengan ketidaksetaraan politik (Green 1993: 198-199).

Demokrasi seharusnya memberikan ruang yang sama antara pria dan perempuan sebab itu berkaitan dengan keterbatasan dan pengalaman. Keterbatasan berkaitan dengan adanya batas mengenai sebuah isu dan pengalaman berkaitan dengan relasi individu dengan masalah privat. Perempuan memiliki kebutuhan yang tidak sepenuhnya menjadi perhatian lelaki sebab keterbatasan informasi dan pengalaman, dan perempuan juga memiliki keterbatasan yang sama terhadap lelaki. Kenyataan demikian bisa menjelaskan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan perempuan, misalnya kelahiran, kehamilan, dan pendidikan perempuan hanya bisa dipahami oleh perempuan, maka perempuan harus mendapatkan tempat yang sama dalam sistem politik (Green 1993: 200-201). Jika hal tersebut gagal direspon dengan

baik, maka perempuan selamanya akan mengalami kondisi ketidakberdayaan yang lebih parah dibandingkan keseluruhan.

Kesimpulan.

Pada bagian akhir tulisan, maka artikel ini menyimpulkan tiga poin besar. Pertama, kebebasan politik memang berkaitan erat dengan demokrasi dan kapitalisme, walaupun itu memang menjadi problematika tersendiri. Kebebasan politik sudah pasti akan mendorong proses demokratisasi dan kapitalisme, namun demokrasi dan kapitalisme tidak sepenuhnya menjamin kebebasan politik. Kondisi demikian disebabkan oleh relasi antara demokrasi dan kapitalisme justru meminggirkan kedaulatan individu seiring keduanya dilakukan oleh jaringan elit politik dan ekonomi. Demokrasi hanya menjadi sebatas prosedur demokrasi representasi oleh sistem kapitalisme, dan demokrasi juga mengarah sebagai sistem sosial yang menekankan efisiensi.

Kedua, demokrasi yang dikuasai oleh jaringan elit menyebabkan distribusi kekayaan menyebar hanya di kalangan elit. Pemusatan kekuasaan oleh elit menyebabkan distribusi barang dan jasa serta lain halnya hanya berada di tangan elit. Kondisi demikian menjadikan mayoritas masyarakat berada dalam situasi yang lemah. Masyarakat yang lemah tidaklah tunggal sebab itu masih terbagi antara masyarakat kelas bawah dan masyarakat kelas menengah. Kelas miskin menjadi yang terbawah sementara kelas menengah berada dipertengahan. Kelas menengah terbentuk dari golongan profesional yang memang memiliki kondisi finansial lebih baik, namun kelas yang sama juga rentan mengalami kondisi terdepresiasi. Kelas menengah mungkin saja memiliki daya tawar politik yang baik, namun kelas menengah terkadang lemah terhadap sistem pembagian kerja dalam sistem kapitalis.

Ketiga, jenderisasi demokrasi menjadi sangat penting sebab itu memberikan ruang suara bagi perempuan. Perempuan sering harus menerima keputusan politik yang berdampak bagi perempuan, namun proses perumusan kebijakan justru meminggirkan suara perempuan. Jenderisasi demokrasi berusaha mengatasi problematika ketidaksetaraan politik dengan menempatkan lelaki dan perempuan dalam posisi setara, sehingga lelaki dan perempuan bisa mengatasi secara bersama-sama semua persoalan ketidaksetaraan tersebut. Ketidaksetaraan sebenarnya berperan dalam penciptaan beban ganda ketidakberdayaan oleh perempuan, yaitu ketidakberdayaan kelas sosial oleh kapitalisme dan ketidakberdayaan individu oleh mayoritas anggota kelas.

Referensi:

- Baker, C. Edwin. 1998. *The Media That Citizens Need*. University of Pennsylvania Law Review, 147: 2 317-408
Lairmont, Frederick F. 1995. *Triumphs of the Media Behemoth*. Economic and Political Weekly, 30: 52, 3352-3354.
Birch, Anthony H. 2001. *The Concepts and Theories of Modern Democracy* 2nd Edition. London: Routledge.

Nonini, Donald M. 2005. Making the Case for Kleptocratic Oligarchy (as the Dominant Form of Rule in the United States), *Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice*, 49: 1, 177-189.

Pressman, Steven. 2015. Defining and Measuring the Middle Class. Working Paper 007. American Institute for Economy Research.

Sen, Amartya, *Development as Freedom*, New York: Alfred A. Knopf, 1999.

Tittle, Charles R. and Mark C. Stafford. 1992. Urban Theory, Urbanism, and Suburban Residence. *Social Forces*, 70: 3, 725-744.